



## PENGELOLAAN WISATA PANTAI PANJANG DALAM PERSPEKTIF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

### MANAGEMENT OF PANJANG BEACH TOURISM FROM THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PERSPECTIVE

Henny Aprianty<sup>1)</sup>; Muksin Aviko<sup>2)</sup>; Evsa Wulan Suri<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Program Studi Administrasi Publik Universitas Prof.Dr.Hazairin,SH Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [hennyaprianty666@gmail.com](mailto:hennyaprianty666@gmail.com)

#### How to Cite :

Aprianty, H., Aviko, M., Suri, E.W. (2024). Pengelolaan Wisata Pantai Panjang Dalam Perspektif Public Private Partnership. SENGKUNI Journal – Social Sciences and Humanities, 5(2) . DOI: <https://doi.org/10.37638/sengkuni.5.2.173-180>

#### ARTICLE HISTORY

Received [27 July 2024]

Revised [25 August 2024]

Accepted [29 November 2024]

Published [31 December 2024]

#### KEYWORDS

wisata pantai panjang,  
Perspektif Public Private  
Partnership

This is an open access  
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)  
license



#### ABSTRAK

Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana keberhasilan kemitraan pengelolaan pariwisata pantai panjang dan Bagaimana program pengembangan wisata pantai panjang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Kerjasama antara Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu dan pihak swasta dalam pengelolaan Pantai Panjang telah memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, memperkuat kapasitas lokal, dan mendorong inovasi dalam pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab. Kemitraan ini memprioritaskan keadilan, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan, menjadi contoh positif kemitraan sektor publik-swasta. Namun, pihak swasta menghadapi tantangan regulasi izin usaha yang kompleks, melibatkan berbagai persyaratan dan prosedur yang rumit. Pihak swasta berinvestasi dalam pembangunan fasilitas seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan area rekreasi, dengan dukungan izin dan regulasi dari Dinas Pariwisata. Pengembangan strategi pemasaran bersama dilakukan untuk mempromosikan Pantai Panjang, termasuk kampanye media sosial, pameran wisata, dan promosi melalui agen perjalanan. Selain itu, peningkatan fasilitas dan pelayanan mencakup penyediaan delapan titik tempat parkir, yang pengelolaannya akan ditentukan melalui kesepakatan teknis, serta kontrak sewa lahan untuk para pedagang.

#### ABSTRACT

The main problem of this research is how the long beach tourism management partnership is successful and how the long beach tourism development program works. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the collaboration between the Bengkulu Province Tourism Office and the private sector in managing Panjang Beach has provided significant economic benefits, strengthened local capacity, and encouraged innovation in responsible tourism management. This partnership prioritizes fairness, effectiveness, efficiency and sustainability, becoming a positive example of a public-private sector partnership. However, the private sector faces the challenge of complex business licensing regulations, involving various complicated requirements and procedures. The private sector invests in the construction of facilities such as hotels, restaurants, shopping centers and recreation areas, with the support of permits and regulations from the Tourism Office. Joint marketing strategy development was carried out to promote Long Beach,

*including social media campaigns, tourist exhibitions, and promotions through travel agents. In addition, improving facilities and services includes the provision of eight parking spots, the management of which will be determined through a technical agreement, as well as land rental contracts for traders.*

## PENDAHULUAN

Public Private Partnership (PPP) dalam kajian administrasi public menjadi hal yang penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan publik), karena dengan PPP sebagai suatu kajian dalam administrasi public dapat memberikan kualitas, efektifitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan publik. Pelibatan sektor swasta dalam urusan pelayanan publik karena sektor swasta dianggap lebih memiliki sumberdaya yang baik, dan bagi sektor public dapat meringankan tanggungjawab/beban serta efisiensi sumberdaya dan biaya.

Perlunya keterlibatan sektor swasta (PPP) dalam menangani urusan publik untuk pembangunan dan penyediaan infrastruktur atau fasilitas publik disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, efisiensi cara kerja sektor swasta, kualitas SDM yang mereka miliki, dan kecepatan dalam mengadopsi perkembangan teknologi sering menjadi alasan mengapa perlu melibatkan sektor swasta (PPP) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Wahyuni, D. 2021:105)

Pengembangan pariwisata dimana suatu destinasi wisata dipengaruhi oleh beberapa hal yang penting seperti daya tarik untuk para wisatawan, fasilitas-fasilitas dan atraksi, lokasi geografis, jalur transportasi, stabilitas politik, lingkungan yang sehat dan tidak ada larangan/batasan pemerintah. Dengan Pendekatan Public Private Partnership (PPP) dalam usaha pengembangan pariwisata Di Kota Bengkulu dipandang penting untuk memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang ketertarikan atau pemenuhan pelayanan di suatu destinasi wisata.

Kawasan Wisata Pantai Panjang, sejak 2011 telah ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang dicantumkan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini seharusnya disikapi oleh pemerintah daerah sebagai sebuah kesempatan untuk memajukan pariwisata di Provinsi Bengkulu. Pengembangan pariwisata di Pantai Panjang merupakan hal yang sangat penting karena memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun hal tersebut tentu memerlukan suatu pengembangan wisata pantai panjang yang memiliki daya Tarik, sehingga para wisatawan memiki ketertarikan untuk berkunjung. Dari hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah (PAD) di sektor pariwisata, mengingat PAD sector pariwisata di Provinsi Bengkulu mengalami penurunan. Karena kemampuan pemerintah Bengkulu yang terbatas dalam melakukan pengembangan pariwisata, termasuk dari segi anggaran yang dikeluarkan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya 10 bentuk kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam melaksanakan pengelolaan pariwisata di Kota Bengkulu melihat potensi yang banyak untuk dikembangkan seperti penyediaan sarana dan prasarana pariwisata namun keuangan pemerintah Kota Bengkulu yang terbatas.

Berangkat dari latar belakang tersebut diatas, Peneliti tertarik untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengelolaan wisata Pantai Panjang dalam

perspektif Public Private Partnership (PPP). Penelitian ini sangat penting mengingat potensi ekonomi yang besar dari sektor pariwisata, terutama di daerah seperti Kota Bengkulu. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta, diharapkan dapat meningkatkan pengembangan dan pengelolaan wisata Pantai Panjang secara efektif dan berkelanjutan. Dan mengangkat sebuah judul skripsi yaitu, "Pengelolaan Wisata Pantai Panjang Dalam Perspektif Public Private Partnership".

Untuk mempertajam penelitian maka dalam penelitian kualitatif perlu menetapkan fokus. Spadley dalam Sugiyono (2010: 208) menyatakan bahwa A focused refer to a single cultural domain or a few related domains maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Berdasarkan teori diatas, maka yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini adalah Pengelolaan wisata pantai panjang dalam perspektif Public private Partnership, yang objek utamanya merupakan Pegawai Dinas Pariwisata Kota Bengkulu. Adapun perumusan masalah maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Pengelolaan wisata pantai panjang dalam perspektif Public private Partnership yang diuraikan dalam beberapa pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana keberhasilan kemitraan pengelolaan pariwisata pantai panjang, 2. Bagaimana program pengembangan wisata pantai panjang ?'. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini mengetahui dan memahami Pengelolaan wisata pantai panjang dalam perspektif Public private Partnership yang di deskripsikan untuk:1. Mengetahui dan memahami keberhasilan kemitraan pengelolaan pariwisata pantai panjang, 2. Mengetahui dan memahami program pengembangan wisata pantai panjang.

## **LANDASAN TEORI**

### **Public Privat Partnership**

Skema public-private partnership (PPP) sebenarnya sudah ada sejak zaman orde baru di era soeharto, namun PPP diadopsi secara efektif di Indonesia di tahun 2005. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh urgensi pembangunan infrastruktur dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan pelayanan publik yang baik. Di Indonesia, PPP diatur dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Adapun yang menjadi definisi dari PPP berdasarkan perpres tersebut adalah menjelaskan PPP sebagai kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerjasama, dimana sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

### **Public Private Partnership Sebagai Kebijakan Publik**

Public Private Partnership (PPP) sebagai kebijakan publik memiliki tujuan

tertentu yang ingin dicapai, yaitu menutup kesenjangan finansial (financial gap) yang terjadi akibat ketidakcukupan anggaran Pemerintahan Indonesia dalam membiayai infrastruktur. Adopsi skema penyediaan Public Private Partnership (PPP) atau yang saat ini lebih dikenal dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) merupakan suatu pengadopsian kebijakan public (Nugroho dan Toyib, 2018).

### **Tipe dan Bentuk Public Private Partnership (PPP)**

Kemitraan antara pemerintah dan swasta terkadang masih dipahami sebatas kerjasama yang terikat pada sebuah kontrak, padahal jika dikaji lebih dalam dalam kajian administrasi public, PPP berbeda dengan bentuk kerjasama seperti kontrak kerja, outsourcing maupun Wastanisasi. Kerjasama dalam bentuk kontrak kerja, outsourcing merupakan tipe kerjasama yang hanya memenuhi dan menyelesaikan permasalahan dari satu pihak saja. Kemitraan PPP merupakan kerjasama yang terbangun atas dasar komitmen bersama untuk menyelesaikan permasalahan bersama dengan mengerahkan berbagai sumberdaya dan kapasitas yang dimiliki para pihak aribat.

Lebih jelasnya dapat dijelaskan bahwa perdebaan antara PPP dengan kerjasama lainnya dapat dilihat dari ungkapan dari Lienhard dalam Purwanti (2016) menyebutkan karakteristik dari kemitraan antara pemerintah dan swasta, antara lain :

- a. Kerjasama melibatkan setidaknya-tidaknya satu lembaga pemerintah dan satu lembaga swasta.
- b. Kerjasama dilakukan untuk mencapai tujuan bersama atau secara timbal balik kompatibel dan saling melengkapi. Bersifat kompleks dan membutuhkan koordinasi yang intensif.
- c. Kerjasama dilakukan dalam rangka melakukan procurement atau pelaksanaan tugas tertentu.
- d. Memiliki orientasi jangka panjang.
- e. Penyatuan, pemanfaatan, dan sinergi dari sumberdaya pemerintah dan swasta.
- f. Berbagi resiko.
- g. Perolehan dalam efisiensi dan efektivitas.

### **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Pariwisata Kota Bengkulu. Penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive), alasan peneliti mengambil sampel lokasi tersebut karena Kantor Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tersebut melaksanakan pengembangan dan pengolahan Pariwisata. Dalam penelitian ini, dari setiap variabel yang ada akan diberikan penejelasan, selanjutnya menentukan indikator yang akan diukur, Menurut Bodgan & Biklen dalam Moleong (2007: 248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemitraan Pengelolaan Pantai Panjang adalah bentuk kerjasama antara pihak pemerintah (Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu) dan pihak swasta untuk mengelola, mengembangkan, dan meningkatkan daya tarik wisata Pantai Panjang. Tujuan utama dari kemitraan ini adalah untuk memaksimalkan potensi ekonomi dan sosial dari kawasan pantai, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat lokal serta pelaku usaha swasta. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dengan mewawancarai beberapa narasumber mengenai Pengelolaan Wisata Pantai Panjang Dalam Perspektif Public Private Partnershi. Untuk mengetahui dan memahami keberhasilan kemitraan pengelolaan pariwisata pantai panjang Maka peneliti akan membahas di dalam hasil penelitian dengan menggunakan teori Ukuran Casanova dengan indicator Aquity (Keadilan), Effectiveness (Efektivitas), Efficiency (Efisien), Exportability (Tingkah Laku).

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Indikator Eguity dalam kemitraan PPP di Pantai Panjang diwujudkan melalui distribusi manfaat ekonomi yang adil, peningkatan fasilitas wisata, partisipasi masyarakat lokal, dan kontribusi signifikan dari pihak swasta, meskipun terdapat tantangan regulasi yang harus diatasi. Efektivitas kemitraan PPP diukur dengan sejauh mana kemitraan dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan pariwisata, tujuan dapat mencakup peningkatan jumlah wisatawan, peningkatan pendapatan lokal, atau pelestarian lingkungan. Evaluasi efektivitas ini sering kali melibatkan penggunaan indikator kinerja yang terukur dan metodologi evaluasi yang dapat mendokumentasikan dampak positif dari kemitraan PPP terhadap pencapaian tujuan-tujuan ini. Dalam pengelolaan pariwisata, efisiensi dapat dilihat dari bagaimana dana investasi digunakan untuk pengembangan infrastruktur pariwisata, pengelolaan operasional yang hemat biaya, dan pemeliharaan yang efisien dari aset-aset pariwisata. Dalam konteks pengelolaan pariwisata, ini dapat berarti mengadopsi model pengelolaan pariwisata yang berhasil dari destinasi lain, mengintegrasikan teknologi baru dalam manajemen pariwisata, atau mempromosikan praktik keberlanjutan yang inovatif.

### Pembahasan

Secara keseluruhan, kerjasama antara Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu dan pihak swasta dalam pengelolaan Pantai Panjang tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan, tetapi juga memperkuat kapasitas lokal dan mendorong inovasi dalam pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab. Dengan memprioritaskan keadilan, efektivitas, efisiensi, dan exportability, kerjasama ini menjadi contoh bagaimana kemitraan sektor publik-swasta dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian lokal.

Dalam konteks kerjasama antara Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu dan pihak swasta dalam sewa menyewa lahan pariwisata Pantai Panjang, konsep-konsep seperti keadilan, efektivitas, efisiensi, dan exportability (tingkah laku) dapat diaplikasikan sebagai berikut: *Equity* (Keadilan): Salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan mengalokasikan sebagian pendapatan dari penyewaan lahan untuk program pembangunan masyarakat lokal. Pendapatan

ini dapat digunakan untuk infrastruktur yang mendukung pariwisata, seperti peningkatan akses jalan, sanitasi, atau fasilitas umum lainnya. Selain itu, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat lokal dalam industri pariwisata juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. *Effectiveness* (Efektivitas): Efektivitas kerjasama ini tercermin dalam peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Panjang. Pihak swasta berperan krusial dalam meningkatkan daya tarik destinasi dengan menyediakan fasilitas yang memadai dan mempromosikan secara efektif melalui kampanye pemasaran yang terencana. Evaluasi efektivitas juga meliputi peningkatan pendapatan lokal yang berasal dari aktivitas pariwisata, seperti dari tiket masuk, parkir, dan layanan pariwisata lainnya. Dengan meningkatnya pendapatan ini, masyarakat lokal dapat merasakan manfaat langsung dalam bentuk lapangan kerja, peluang usaha, serta peningkatan pendapatan yang meningkatkan kesejahteraan mereka. *Efficiency* (Efisiensi): aspek efisiensi dalam pengelolaan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan operasional. Pihak swasta harus mampu mengelola biaya operasional dengan efisien tanpa mengorbankan kualitas layanan atau pelestarian lingkungan. Hal ini mencakup manajemen biaya harian, perawatan fasilitas, serta pengelolaan risiko baik dari segi lingkungan maupun finansial. Dengan adanya rencana mitigasi risiko yang matang, seperti penanganan limbah dan perlindungan terhadap ekosistem pantai, kerjasama ini dapat beroperasi secara berkelanjutan bahkan di tengah tantangan seperti fluktuasi kunjungan wisatawan atau perubahan regulasi. *Exportability* (Tingkah Laku): Tingkah laku atau *exportability* dari kerjasama ini menunjukkan potensi untuk menginspirasi dan mentransfer praktik terbaik ke destinasi pariwisata lainnya. Model pengelolaan yang berhasil di Pantai Panjang dapat diadaptasi dan diterapkan di berbagai destinasi wisata, baik di dalam Provinsi Bengkulu maupun di luar provinsi. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam transfer teknologi dan pengetahuan tentang praktik keberlanjutan memberikan dampak positif yang lebih luas dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan pariwisata serta menjaga kelestarian lingkungan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Aspek keberhasilan kemitraan

Secara keseluruhan, kerjasama antara Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu dan pihak swasta dalam pengelolaan Pantai Panjang tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan, tetapi juga memperkuat kapasitas lokal dan mendorong inovasi dalam pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab. Dengan memprioritaskan keadilan, efektivitas, efisiensi, dan *exportability*, kerjasama ini menjadi contoh bagaimana kemitraan sektor publik-swasta dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian lokal. Namun pihak swasta dihadapi dengan Regulasi izin usaha yang berbelit atau kompleks seringkali menjadi tantangan bagi pelaku usaha karena melibatkan berbagai persyaratan dan prosedur

yang rumit serta panjang

2. Aspek Program pengembangan

Aspek program pengembangan wisata Pantai Panjang dalam hal kerja sama antara Dinas Pariwisata (Dinpar) dan pihak swasta adalah Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur, Pemasaran dan Promosi Bersama, Peningkatan Fasilitas dan Pelayanan.

- a. Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur
- b. Pemasaran dan Promosi Bersama
- c. Peningkatan Fasilitas dan Pelayanan

### Saran

Agar: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu perlu mempermudah persyaratan bagi

pihak swasta dalam mengelola Pantai Panjang untuk meningkatkan minat dan jumlah pengunjung. Pengurangan birokrasi bisa dilakukan dengan menyederhanakan proses perizinan dan mengadopsi sistem online. Insentif seperti pengurangan pajak dan dukungan finansial juga dapat menarik investasi. Selain itu, skema kemitraan publik- swasta yang jelas dengan kontrak jangka panjang akan memberikan kepastian bagi investor.

Pemerintah perlu memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengelola dan mengembangkan potensi wisata lainnya di Kota Bengkulu. Hal ini dapat dimulai dengan melakukan studi kelayakan dan pemetaan potensi wisata. Kampanye promosi intensif, kolaborasi dengan influencer, dan peningkatan infrastruktur dasar seperti akses jalan, transportasi umum, dan fasilitas umum di sekitar area wisata akan mendukung kegiatan pariwisata. Program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal dalam sektor pariwisata juga penting untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan profesional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pariwisata di Kota Bengkulu akan berkembang, menarik lebih banyak pengunjung, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan, (ed.). 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia
- Domai, Tjahjanulin. 2011. Sound Governance. Malang: Universitas Brawijaya Press
- Gulo, W., 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hanif, Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta:Grasindo
- Hanafi, Imam & Mugroho, Laksono. 2009. Desentralisasi Fiskal: Kebijakan Pertimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia. Malang: UB PRESS
- Hadinoto, Kusudianto. 1996. Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata. Jakarta: UI Press
- Ismawati, Septian Catur. 2012. Kemitraan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Meningkatkan Potensi Wisata. Malang: UB Press
- Juanda, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: PT Alumn
- Karlengie, Purba Karenka. 2015 Dampak Pariwisata terhadap Aspek Sosial

- Budaya, Ekonomi Masyarakat Kawasan Pantai. Malang: UB Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Hidayat Djabbari, Public Private Partnership Dalam Pengembangan pariwisata di kabupaten toraja Utara, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021 PERPRES No. 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
- Ardiansyah, F. W., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2023). Analisis Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 741- 756.
- Destiana, R., Kismartini, K., & Yuningsih, T. (2020). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 132-153.
- Ardiansyah, F. W., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2023). Analisis Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 741- 756.